Public Sphare
"Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum"

PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3087
Vol. 5, No. 2, Juli 2026



DARI PEMILIH KE PENYELENGGARA: PARTISIPASI POLITIK PEMUDA KARANG TARUNA PADA PILKADA 2024

Hana Nurisman[1], Asep Mahpudz[2], Leni Anggraeni[3]
[1,2,3]Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
email: hana.nurisman@upi.edu, asepmahpudz@upi.edu, l_anggraeni@upi.edu

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-07-02
Revised : 2026-07-18
Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS
political participation; youth; civic participation; election organizers; 2024 Regional Head Election.

KATA KUNCI
partisipasi politik; generasi muda; civic participation; penyelenggara pemilu; Pilkada 2024.

ABSTRACT

Youth political participation is essential to strengthening democracy, yet it is often limited to exercising voting rights. This study aims to analyze the forms and distribution of Karang Taruna members' roles as organizers in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in South Cimahi District, the factors motivating their involvement, and the experiences gained. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with four key informants, participatory observation, document analysis, and open-ended questionnaires involving 61 respondents. The data were analyzed thematically and validated through source and method triangulation. The findings reveal that youth participation occurs across formal and informal domains, including hybrid roles connecting institutional duties with community activities. Participation is driven by civic responsibility as an internal motivation and organizational support and social networks as external factors. These experiences also enhance civic competence, political awareness, and willingness to remain politically engaged. This study concludes that Karang Taruna functions as civic infrastructure that transforms youth political awareness into concrete action and strengthens local democracy.

ABSTRAK

Partisipasi politik pemuda penting bagi penguatan demokrasi, tetapi selama ini lebih sering dipahami sebatas penggunaan hak pilih. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan distribusi peran anggota Karang Taruna Kecamatan Cimahi Selatan sebagai penyelenggara Pilkada 2024, faktor pendorong keterlibatan, serta pengalaman yang diperoleh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci, observasi partisipatif, penelusuran dokumen, dan kuesioner terbuka kepada 61 responden. Data dianalisis secara tematik dan diuji melalui triangulasi sumber serta teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda berlangsung dalam ranah formal dan informal, termasuk peran hibrid yang menghubungkan tugas kelembagaan dengan aktivitas komunitas. Keterlibatan didorong oleh tanggung jawab kewarganegaraan sebagai motivasi internal serta dukungan organisasi dan jaringan sosial sebagai faktor eksternal. Pengalaman langsung tersebut turut meningkatkan kompetensi kewarganegaraan, kesadaran politik, dan keinginan untuk terus berpartisipasi. Penelitian menyimpulkan bahwa Karang Taruna berperan sebagai infrastruktur kewarganegaraan yang mengubah kesadaran politik pemuda menjadi tindakan nyata dan memperkuat demokrasi lokal.

1. Pendahuluan

Demokrasi memperoleh maknanya yang paling nyata ketika warga ikut ambil bagian dalam memutuskan dan menjalankan urusan publik; di sanalah kedaulatan rakyat berhenti menjadi slogan dan menjelma tindakan (Budiarjo, 2008). Pada lingkup lokal, Pemilihan Kepala Daerah menjadi panggung yang paling dekat dengan keseharian warga sekaligus sarana mewujudkan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 menempatkan anak muda pada posisi yang penting, bukan sekadar karena jumlah mereka besar, tetapi karena di tangan merekalah keberlanjutan budaya berpartisipasi akan ditentukan. Sayangnya, keterlibatan kaum muda kerap dipersempit hanya pada saat mencoblos, sehingga beragam bentuk peran lain yang sebenarnya menopang integritas pemilu jarang diperhatikan.

Sebagian besar tulisan tentang partisipasi politik pemuda di Indonesia masih berkutat pada perilaku memilih (*voting behavior*) beserta faktor yang memengaruhinya, mulai dari melek politik, akses informasi, sampai penggunaan media digital. Padahal partisipasi tidak berwajah tunggal: rentangnya membentang dari urusan elektoral, keterlibatan komunitas, hingga ekspresi politik (Verba *et al*., 1995). Salah satu sisi yang nyaris luput dari pembahasan adalah keterlibatan pemuda sebagai penyelenggara, baik sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), apalagi bila peran itu mereka jalankan lewat organisasi kepemudaan di lingkungan sendiri. Celah ini layak digarap karena menjadi penyelenggara menuntut komitmen, kecakapan teknis, dan watak kewarganegaraan yang berbeda secara mendasar dari sekadar memberikan suara.

Beralih dari pemilih ke penyelenggara bukan semata menambah objek kajian, tetapi mengubah bobot analisisnya. Seorang pemilih berhubungan dengan demokrasi secara sekejap dan tanpa nama; seorang penyelenggara justru menanggung beban menjaga prosedur tetap jujur, tunduk pada aturan lembaga, dan dituntut netral di tengah suasana yang mudah memanas. Dengan kata lain, pemuda tidak lagi berdiri sebagai penerima hasil, melainkan sebagai penjaga prosesnya. Ketika peran itu disalurkan lewat organisasi kepemudaan, muncul sejumlah pertanyaan yang belum terjawab: bagaimana peran-peran dibagi di antara anggota, sumber daya apa yang menentukan penempatan seseorang, dan apa yang membuat anggota rela memikulnya secara sukarela.

Untuk menjawabnya, kajian ini memakai *civic participation* sebagai payung yang dijabarkan ke dalam tiga sudut pandang yang saling bertaut. *Civic engagement* dipakai membaca bentuk dan struktur keterlibatan dengan merujuk indikator (Keeter, 2002) serta tipologi klasik Almond dan Huntington–Nelson. *Civic responsibility* menelaah dorongan keterlibatan dengan bersandar pada dimensi motivasi dalam *Civic Voluntarism Model* gagasan modal sosial (Putnam, 1993). *Civic competence* menilai dampak keterlibatan lewat konsep *civic learning* dalam pendidikan kewarganegaraan (Galston, 2001). Dirangkai bersama, ketiganya menautkan bentuk, dorongan, dan dampak dalam satu alur yang utuh, sehingga partisipasi tidak terbaca sebagai peristiwa lepas dari konteks organisasinya.

Persoalan ini bertambah menarik karena ada kejanggalan di lapangan. Angka memilih yang tinggi tidak otomatis menandakan keterlibatan yang dalam; partisipasi elektoral bisa saja ramai di permukaan namun dangkal dan musiman (Dalton, 2008). Gejala semacam ini lazim dibaca sebagai tanda apatisme anak muda. Namun kenyataannya, di sejumlah komunitas justru ada pemuda yang dengan sukarela mengambil peran penyelenggara dengan beban kerja berat dan tuntutan netralitas ketat. Kontradiksi inilah yang menggeser pertanyaan dari 'seberapa banyak' menjadi 'mengapa' dan 'lewat mekanisme apa' keterlibatan itu terjadi.

Karang Taruna menempati posisi yang relevan untuk pertanyaan tersebut. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan berbasis kelurahan yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013, ia bukan sekadar wadah pemberdayaan, tetapi berpeluang menjadi ruang belajar berdemokrasi dan saluran *civic engagement* di tingkat bawah. Kecamatan Cimahi Selatan dipilih karena coraknya yang urban, padat, beragam, dan akrab dengan arus informasi digital, sehingga sekaligus merepresentasikan tantangan dan peluang partisipasi pemuda kota. Wilayah perkotaan kecil seperti ini selama ini jarang menjadi fokus kajian, padahal dinamikanya khas.

Beberapa kajian terdahulu telah menyinggung peran organisasi kepemudaan dalam pemilu. (Simaremare *et al*., 2024) dan (Prianti *et al*., 2024), misalnya, menempatkan Karang Taruna sebagai penggerak sosialisasi politik dan pendidikan demokrasi yang menaikkan kesadaran pemuda, sementara (Togala *et al*., 2025), (Nugraha *et al*., 2024) dan (Pramana, 2025) menyoroti pengaruh literasi politik dan media digital terhadap tingkat partisipasi. Sumbangan mereka berharga, tetapi

pembahasannya umumnya berhenti pada gambaran besaran dan ragam keterlibatan, belum menyentuh bagaimana keterlibatan itu ditata dan dibagi di dalam organisasi, apalagi mekanisme yang menggerakkannya. Di ruang kosong itulah kajian ini berpijak.

Berangkat dari sana, kajian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan yang saling berkaitan: bagaimana bentuk dan distribusi peran anggota Karang Taruna Cimahi Selatan sebagai penyelenggara Pilkada 2024, apa yang mendorong mereka terlibat bila ditimbang dari perspektif *civic participation*, serta bagaimana pengalaman dan kepuasan yang mereka peroleh dari keterlibatan itu. Ketiga pertanyaan tersebut menuntun analisis pada bentuk, mekanisme pendorong, dan dampak keterlibatan. Kebaruan kajian ini bertumpu pada tiga hal. Pertama, fokusnya bergeser dari pemilih ke penyelenggara sehingga memperluas cakupan kajian partisipasi pemuda. Kedua, ia memetakan cara organisasi membagi peran dan menemukan posisi hibrid yang menjembatani peran formal dan informal, sebuah catatan kritis bagi ketegasan dikotomi dalam tipologi partisipasi yang lazim. Ketiga, ia menjelaskan mekanisme keterlibatan sebagai perpaduan *civic responsibility* dan modal sosial, yang sekaligus menjadi bantahan terhadap tesis apatisme pemuda.

2. Metode

Kajian ini memakai pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena yang hendak dipahami adalah makna, motif, dan pengalaman subjek secara mendalam, bukan menguji hipotesis atau menarik kesimpulan statistik (Creswell, 2013). Rancangan studi kasus dipakai sebab fenomena yang diteliti, yakni keterlibatan anggota Karang Taruna sebagai penyelenggara Pilkada 2024, terikat pada ruang dan waktu tertentu dan menuntut penelusuran konteks yang intensif (Yin, 2011).

Lokus kajian adalah Karang Taruna Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang menjadi koordinator organisasi serupa di tingkat kelurahan. Penelusuran mencakup aras kecamatan dan tiga kelurahan, yaitu Cibeber, Leuwigajah, dan Melong. Pilihan ini didasari kesesuaian dengan fokus kajian sekaligus karakter urban wilayah yang turut mewarnai pola partisipasi.

Partisipan ditetapkan secara *purposive* dengan menimbang keterkaitan, kecakapan, dan pengalaman langsung dalam kegiatan organisasi maupun Pilkada 2024. Sesuai watak studi kasus kualitatif, data pokok bersumber dari tiga teknik yang saling menopang, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen. Wawancara digelar bersama empat informan kunci dari pengurus inti tingkat kecamatan yang berada di simpul perencanaan dan koordinasi, dengan kode N1 sampai N4 demi menjaga kerahasiaan (lihat Tabel 1). Observasi mengikuti praktik keterlibatan anggota secara langsung di lapangan, sementara dokumen yang ditelaah meliputi arsip kegiatan, notulen penugasan, dan publikasi organisasi. Wawancara dipandu daftar pertanyaan semiterstruktur, hasil observasi direkam dalam catatan lapangan, dan dokumen yang terkumpul dikatalogkan menurut jenis dan tahapan kegiatannya. Kuesioner terbuka kepada anggota di tingkat kecamatan dan kelurahan (kode R1–R61) ditempatkan sebagai data pelengkap; jawaban yang masuk diperlakukan sebagai teks yang ditafsir secara tematik, bukan angka yang dihitung frekuensinya, sehingga tidak menggeser kajian dari paradigma kualitatif

Tabel 1. Profil Informan Kunci

Kode	Kedudukan dan Peran	Sumber Data Utama
N1	Pengurus inti; penggagas pembagian peran berbasis kapasitas (“meritokrasi partisipatif”)	Wawancara, observasi
N2	Pengurus; menyoroti pembekalan dan pelatihan teknis penyelenggara	Wawancara
N3	Pengurus yang terlibat penuh dalam struktur kepemiluan resmi (persiapan hingga pemungutan suara)	Wawancara, observasi
N4	Pengurus pada urusan teknis-administratif (data pemilih, koordinasi lintas lembaga)	Wawancara, dokumentasi

Ketiga teknik utama tersebut menggali kedalaman makna pada tahap perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan, sedangkan kuesioner memperluas jangkauan pengalaman anggota di tiga kelurahan. Observasi berlangsung sepanjang tahapan Pilkada 2024, yakni September hingga November 2024. Penafsiran ditempuh secara abduktif, dengan bergerak bolak-balik antara pola di lapangan dan konsep teoretis untuk menemukan penjelasan yang paling masuk akal. Tema analitik tidak ditetapkan di awal, melainkan tumbuh dari hasil pengodean yang lalu dikategorikan dan diuji ketahanannya terhadap seluruh sumber. Sebuah

temuan dianggap kredibel apabila data utama (wawancara, observasi, dokumen) saling bertemu dan diperkuat jawaban responden.

Analisis menempuh tahap reduksi, penyajian, serta penarikan dan pengujian simpulan. Data dipadatkan, dikodekan, lalu dikelompokkan ke dalam tema yang melampaui batas pertanyaan penelitian, sehingga pembahasan tersusun menurut logika tematik, bukan urutan instrumen. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni menyilangkan keterangan informan, hasil observasi, dokumen, dan jawaban responden, lalu mengecek temuan yang sama melalui cara yang berbeda. Demi etika penelitian, identitas subjek disamarkan dalam bentuk kode dan keikutsertaan mereka bersifat sukarela. Cakupan yang hanya menjangkau tiga dari lima kelurahan menjadikan temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik.

3. Hasil dan Pembahasan

Temuan dipaparkan dan ditafsir secara tematik dalam empat tema yang saling bertaut. Tema pertama memetakan bentuk keterlibatan; tema kedua dan ketiga, sebagai inti argumen, menjelaskan pendorong keterlibatan dari sisi dalam dan luar diri; tema keempat menelaah dampak formatifnya. Pada tiap tema, temuan lapangan langsung dikaitkan dengan teori dan diperhadapkan dengan kajian terdahulu agar sumbangannya jelas. Karang Taruna Cimahi Selatan sendiri bekerja di lingkungan kota yang padat dan beragam, dengan akses informasi yang lapang dan penduduk usia produktif yang dominan, situasi yang membuka peluang aksi kolektif sekaligus menyimpan godaan apatisme. Ringkasan keempat tema disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Tema, Temuan Inti, dan Pijakan Teori

Tema	Temuan Inti	Pijakan Teori
Konfigurasi keterlibatan	Peran membentang pada kontinum formal–informal; muncul posisi hibrid; pembagian lewat musyawarah berbasis kapasitas	Indikator Keeter; tipologi Almond dan Huntington–Nelson; dimensi sumber daya CVM
Dorongan internal	Motif utama kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan; imbalan materi bersifat sekunder	Civic responsibility (Adler & Goggin); psychological engagement (CVM)
Penggerak eksternal	Dukungan organisasi dan jaringan sosial menggerakkan sekaligus membatasi keterlibatan	Modal sosial Putnam; recruitment networks (CVM)
Dampak formatif	Tumbuhnya kompetensi dan kesediaan terus terlibat; pergeseran "penonton menjadi pemilik"	Civic competence (Kahne & Middaugh); civic learning (Galston; Torney-Purta dkk.)

Konfigurasi Keterlibatan pada Kontinum Formal–Informal

Keterlibatan anggota tidak berhenti di satu titik, tetapi terbentang pada rentang yang menghubungkan kutub formal dan informal. Di kutub formal, sebagian anggota menempati posisi resmi: N3 masuk penuh ke struktur kepemiluan sejak persiapan sampai pemungutan suara, sedangkan N4 mengurus sisi teknis administratif seperti penataan data pemilih dan koordinasi antarlembaga. Pengamatan langsung dan dokumen organisasi, sebagai sumber utama, memperlihatkan ragam peran formal itu, dari Pantarlih, anggota dan Ketua KPPS, hingga Pengawas TPS; jawaban responden menggemakannya, antara lain dari anggota yang bertugas mengawasi pemungutan dan penghitungan suara serta melaporkan hasilnya (R3). Di kutub informal, peran yang paling sering dijumpai berupa sosialisasi kepada pemilih pemula agar tidak golput, bantuan logistik dan pengamanan TPS, pendokumentasian dan publikasi digital, serta kerelawanan kampanye.

Arsip kegiatan, notulen penugasan, jadwal piket, dan unggahan publikasi menegaskan bahwa peran formal dan informal bukan kegiatan yang terpisah, melainkan satu rangkaian kerja yang dikoordinasikan. Anggota yang memegang posisi resmi tetap terhubung dengan jejaring komunitasnya, sementara anggota di peran informal turut melancarkan tugas penyelenggara formal. Jawaban kuesioner menambah variasi peran yang tidak seluruhnya terekam dalam pengamatan, jadi fungsinya melengkapi, bukan menggantikan, data utama.

Ada hal menarik pada keterlibatan formal: tuntutan netralitas justru membatasi peran organisasi. Seorang petugas KPPS menegaskan bahwa ia tidak menerima penugasan dari Karang Taruna karena harus bersikap netral (R4). Artinya, semakin resmi posisi seseorang, semakin renggang kaitannya dengan identitas organisasi asal. Di sinilah posisi hibrid menjadi penting. Sebagian anggota menjalankan tugas resmi sekaligus melakukan tindakan informal, seperti petugas KPPS yang di sela

tugasnya tetap mengingatkan tetangga untuk datang ke TPS (R9). Kenyataan ini menunjukkan garis pemisah formal–informal di akar rumput tidak setegas yang diandaikan; anggota justru menavigasi dua kesetiaan sekaligus, kepada lembaga penyelenggara dan kepada komunitasnya.

Intensitas keterlibatan bersifat musiman, memuncak di sekitar hari pemungutan dan penghitungan suara serta menuntut kesiapan fisik dan teknis, terutama bagi penyelenggara formal. Sifat yang digerakkan peristiwa (*event-driven*) ini menjelaskan mengapa partisipasi pemuda mudah luput bila yang diukur hanya keterlibatan rutin, padahal pada saat genting justru paling tinggi. Pemanfaatan kecakapan digital untuk dokumentasi dan publikasi pun tidak menggantikan kerja lapangan, melainkan menjadi satu lapisan dalam keterlibatan yang tetap bertumpu pada kehadiran nyata. Temuan ini memberi koreksi halus terhadap kajian yang menonjolkan peralihan ke partisipasi digital: dalam urusan penyelenggaraan pemilu, ranah digital sebatas pelengkap.

Secara teoretis, konfigurasi tadi paling pas dibaca sebagai *civic engagement* yang bersifat majemuk. Mengikuti tiga kelompok indikator (Keeter, 2002) peran formal masuk ranah *electoral indicators*, sosialisasi dan edukasi tergolong *civic indicators*, sedangkan publikasi media sosial menyentuh partisipasi digital, dan tidak jarang ketiganya bertumpuk pada orang yang sama. Klasifikasi formal–informal ini sejalan dengan tipologi (Mas'oed, 1994) serta kategori kegiatan pemilihan dan kegiatan organisasi dari (Huntington & Nelson, 1976). Namun posisi hibrid memberi catatan: di lapangan, kedua bentuk dapat menyatu pada satu individu, sehingga dikotomi yang diandaikan tipologi tidak selalu berlaku. Adapun soal siapa menempati peran apa dapat dijelaskan lewat dimensi kemampuan dan kesempatan dalam *Civic Voluntarism Model* (Verba *et al*., 1995). Penempatan N3 yang bersandar pada rekam jejak, N4 pada bekal sosial-intelektual, serta anggota cakap digital pada urusan humas menunjukkan bahwa sumber daya pribadi, yaitu waktu, pengetahuan, dan pengalaman, menjadi penyaring kedalaman keterlibatan. Prinsip yang disebut N1 sebagai "meritokrasi partisipatif", yang dengan tegas menolak pembedaan berbasis gender, pada dasarnya adalah pelembagaan dimensi kemampuan itu, sebagaimana juga ditekankan bahwa partisipasi dipengaruhi ciri sosial dan kapasitas individu.

Pembagian peran berlangsung cukup tertata. Lewat rapat pleno, anggota boleh menawarkan diri pada bidang yang dikuasai, kompetensi dipetakan menurut latar pendidikan dan pekerjaan, dan wilayah dibagi berdasar kedekatan domisili. Anggota yang terbiasa mengelola konten digital, umpamanya, ditempatkan di bidang hubungan masyarakat (R12). Meski pola ini dinilai adil, keterbatasan tenaga kadang memaksa anggota merangkap tugas (R13). Di sinilah letak sumbangan tema ini bila dibandingkan kajian terdahulu. (Simaremare *et al*., 2024) dan (Prianti *et al*., 2024) memang menempatkan Karang Taruna sebagai pelaku sosialisasi dan pendidikan politik, tetapi memotretnya dalam bentuk yang relatif seragam. Kajian ini melangkah lebih jauh dengan memetakan spektrum peran beserta logika pembagiannya di dalam organisasi dan menemukan posisi hibrid, dimensi yang belum disentuh kajian yang biasanya berhenti pada besaran tingkat partisipasi

.

Civic Responsibility sebagai Dorongan Internal Keterlibatan

Motif yang paling ajeg muncul dari wawancara, dan dikuatkan jawaban responden, adalah kesadaran sebagai warga negara untuk menjaga mutu demokrasi. N1 memaknai keterlibatannya sebagai kesadaran yang tumbuh dari dalam, sedangkan N3 melihatnya sebagai kewajiban yang melekat pada status warga negara. Pemaknaan serupa muncul pada responden yang menilai peran penyelenggara sebagai tanggung jawab moral dan konstitusional demi keberlangsungan demokrasi (R10), kerap disertai keharusan bersikap netral, jujur, dan profesional agar pemilu adil (R14). Salah satu anggota merumuskannya dengan lugas: ikut mengawal demokrasi dari dapur, bukan sekadar menggerutu dari meja makan (R1).

Kesadaran pribadi itu berpadu dengan tanggung jawab sosial dan idealisme khas anak muda. Dari jawaban responden, idealisme tersebut berulang dalam beberapa rupa: keinginan agar pemuda mengambil bagian dalam regenerasi kepemimpinan, ajakan memilih secara rasional dengan menolak serangan fajar (R16), serta dorongan mengajak orang terdekat agar tidak golput. Di tengah dominasi motif normatif ini, imbalan materi ditempatkan sebagai pelengkap, bukan alasan utama (R1, R17). Hanya segelintir pengecualian yang menjadikan faktor finansial sebagai pendorong utama, seperti seorang petugas yang menyebut motivasinya semata uang (R4).

Lapisan motivasi ini paling tepat disebut *civic responsibility*, yaitu kesediaan menaruh kepentingan publik di atas kepentingan pribadi sebagai wujud tanggung jawab warga yang aktif (Adler & Goggin, 2005). Ungkapan mengawal demokrasi dari dapur

memperlihatkan tanggung jawab yang dipilih secara sadar, bukan kepatuhan pasif, senada dengan (Karliani, 2014) yang menyebut *civic participation* berakar pada kesadaran yang tulus dan tanpa paksaan. Dalam *Civic Voluntarism Model* (Verba *et al*., 1995) dalam (Alscher *et al*., 2026) motif ini menempati dimensi *psychological engagement*, dan dalam temuan justru mengungguli dimensi material. Adapun kasus yang didominasi motif finansial, yang dalam tipologi Milbrath dan Goel dalam (Cholisin, 2007) mendekati orientasi instrumental, malah mempertegas bahwa corak umum keterlibatan berorientasi nilai. Relevansi dimensi *psychological engagement* dalam *Civic Voluntarism Model* pada partisipasi generasi muda ini juga dikonfirmasi kajian internasional terbaru (Alscher *et al*., 2026).

Justru keberadaan segelintir kasus material-dominan itu menajamkan pola umumnya. Dalam logika kualitatif, kasus pengecualian bukan gangguan, melainkan pembanding yang menandai batas suatu kecenderungan: ketika sebagian besar menempatkan materi sebagai penunjang, satu-dua kasus sebaliknya menunjukkan orientasi instrumental tetap mungkin ada tanpa menjadi warna utama. Idealisme tadi, dengan penolakannya terhadap politik uang dan ajakan memilih atas dasar pertimbangan, menempatkan anggota sebagai aktor rasional sebagaimana dimaksud (Surbakti, 1992), dan dalam tipologi Paige (dalam Cholisin, 2007) mendekati tipe partisipan aktif yang berbekal kesadaran tinggi serta percaya pada proses.

Temuan ini berseberangan dengan citra apatis yang biasa dilekatkan pada generasi muda. Alih-alih partisipasi dangkal dan ketidakpercayaan pada lembaga (Dalton, 2008) anggota Karang Taruna Cimahi Selatan memperlihatkan kesadaran kewarganegaraan yang cukup kuat. Hal ini menguatkan (Togala *et al*., 2025) dan (Nugraha *et al*., 2024) yang menyebut literasi dan pendidikan politik sebagai penentu keterlibatan, tetapi sekaligus melampauinya: kesadaran tersebut sudah mengendap menjadi disposisi tanggung jawab, bukan sekadar pengetahuan. Inilah sumbangan tema ini, bahwa apatisme bukan watak bawaan pemuda, melainkan bergantung pada tersedianya ruang yang mengubah kesadaran menjadi tindakan, yang membawa pembahasan pada faktor eksternal di tema berikutnya.

Social Capital sebagai Penggerak Eksternal Keterlibatan

Keputusan terlibat ternyata tidak lahir dari kesadaran yang menyendiri, melainkan digerakkan dua faktor luar yang berulang dalam data wawancara dan observasi: dukungan organisasi dan jaringan sosial sekitar. Bobot dukungan organisasi terbaca pada pengakuan seorang anggota bahwa tanpa sokongan itu ia akan ragu untuk aktif (R17), sementara dampak psikologisnya disuarakan anggota lain yang merasa lebih percaya diri karena tidak melangkah sendirian (R18). Dari sisi jaringan, keterlibatan banyak bersandar pada solidaritas teman sebaya yang memunculkan rasa enggan tertinggal, kepercayaan kepada tokoh atau senior yang disegani (R11), serta kedekatan tempat tinggal yang sudah lama terjalin (R19).

Organisasi tidak hanya mendorong, tetapi juga menata perilaku anggota. N1 memandang norma organisasi sebagai pemandu etika agar keterlibatan tidak memicu gesekan, N3 sebagai penjaga netralitas dari afiliasi partisan, dan N4 sebagai batas yang menjaga nama baik lembaga. Mekanisme dukungan ini tampak nyata dalam praktik yang terekam observasi dan dokumen. Menjelang dan selama tahapan Pilkada, organisasi menggelar pertemuan koordinasi, membagi informasi penugasan, dan menjalankan pendampingan antaranggota sehingga keterlibatan terasa sebagai kerja bersama. Kehadiran rekan sebaya dan arahan pengurus yang dipercaya menurunkan keraguan untuk mengambil peran, terutama bagi yang belum berpengalaman. Modal sosial, dengan kata lain, tidak bekerja sebagai gagasan abstrak, melainkan mengalir lewat rutinitas yang bisa diamati, seperti rapat, kanal komunikasi, dan relasi senior-junior.

Kedua faktor itu paling tepat dibaca lewat konsep modal sosial (Putnam, 2000). Kenyataan bahwa anggota terdorong karena merasa tidak sendiri, bahwa solidaritas memunculkan rasa enggan tertinggal, dan bahwa kepercayaan pada tokoh menjadi alasan kuat untuk turun langsung, menandakan Karang Taruna berfungsi sebagai jaringan relasi tepercaya yang menggerakkan keterlibatan. Dalam *Civic Voluntarism Model*, faktor ini menempati dimensi jaringan rekrutmen (*recruitment networks*), sejalan pula dengan (Jennings & Niemi, 1981) peran keluarga, kawan, dan komunitas dalam membentuk sikap politik. Norma timbal balik dan kepercayaan di dalam jaringan itulah yang meredam keraguan sekaligus menyediakan jalur partisipasi yang konkret. Pola ini sejalan dengan temuan internasional terkini bahwa keterlibatan pemuda dalam kegiatan terorganisasi membangun modal sosial dan mendorong partisipasi politik selanjutnya (Fox, 2024) dan (Boat *et al*., 2024).

Modal sosial yang bekerja di sini beroperasi pada dua aras. Aras pertama bersifat mengikat

(*bonding*), tampak pada solidaritas teman sebaya, kedekatan domisili, dan kepercayaan kepada tokoh di dalam komunitas, yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Aras kedua bersifat menjembatani (*bridging*), terlihat pada koordinasi lintas lembaga antara Karang Taruna dan penyelenggara resmi seperti KPU dan Bawaslu, yang membuka pintu ke peran formal yang semula di luar jangkauan komunitas (Putnam, 2000). Karang Taruna karenanya bukan sekadar mempererat ikatan internal, melainkan menjadi simpul yang menghubungkan pemuda dengan struktur kelembagaan demokrasi yang lebih luas. Fungsi normatif yang membatasi pun sebenarnya ekspresi modal sosial: dengan menjaga netralitas dan etika, organisasi merawat kepercayaan yang menopang jaringannya sendiri (Putnam, 1993). Modal sosial di sini bekerja dua arah, mendorong sekaligus mengatur, sehingga partisipasi yang lahir bersifat terarah dan menjaga integritas proses; inilah yang membedakannya dari mobilisasi partisan yang rentan mencederai netralitas.

Perpaduan temuan tema kedua dan ketiga inilah sumbangan teoretis utama kajian ini. Modal sosial menjadi jembatan yang membawa kesadaran kewarganegaraan dari sekadar sikap menjadi tindakan; tanpa jaringan organisasi yang menggerakkan, *civic responsibility* berisiko mengendap sebagai niat yang tak tersalurkan. Senada dengan (Pramana, 2025) yang menyoroti peran komunitas dan media, kajian ini menambahkan penjelasan tentang 'mengapa' keterlibatan terjadi, yakni lewat tautan antara dorongan internal *civic responsibility* dan penggerak eksternal modal sosial. Dengan begitu, partisipasi pemuda sebagai penyelenggara tidak cukup diterangkan oleh kesadaran individu semata, melainkan oleh persenyawaannya dengan jaringan sosial yang menaungi, yang sekaligus menjelaskan mengapa apatisme dapat diatasi ketika tersedia infrastruktur sosial pemobilisasi.

Civic Competence dan Keberlanjutan sebagai Dampak Formatif

Pengalaman menjadi penyelenggara berbuah penguatan kapasitas dan kesadaran politik. Wawancara dan jawaban responden sama-sama menunjukkan kepuasan, baik atas pengalaman pribadi maupun sumbangan sosial yang diberikan. Sebagian mengaitkannya dengan tumbuhnya potensi diri dan pengakuan atas kontribusi, seperti merasa pendapatnya didengar (R3). Kepuasan menguat pada sisi sosial: muncul kebanggaan menjadi bagian dari sejarah demokrasi di daerahnya (R5) dan kesadaran bahwa kehadiran pemuda sebagai petugas menumbuhkan kepercayaan warga pada kejujuran proses di TPS (R11). Yang paling dalam adalah pergeseran cara pandang dari sekadar penonton menjadi pemilik proses demokrasi (R23).

Pengamatan pada hari pemungutan dan penghitungan suara memperlihatkan kompetensi itu bekerja nyata. Anggota di peran formal menjalankan prosedur teknis, melayani pertanyaan warga, dan menjaga ketertiban TPS dengan ketenangan yang menandakan kesiapan, sementara yang di peran informal membantu kelancaran logistik dan komunikasi. Dokumen kegiatan menunjukkan koordinasi yang relatif tertib meski di bawah tekanan waktu. Gambaran ini menegaskan bahwa kompetensi yang dibahas bukan klaim di atas kertas, melainkan kapasitas yang teramati dalam tindakan; pertemuan antara keterangan informan dan praktik yang disaksikan langsung itulah yang mengukuhkan temuan, sekaligus menempatkan jawaban kuesioner sebagai penegas, bukan satu-satunya sumber.

Pergeseran dari penonton ke pemilik layak dibaca sebagai perubahan identitas kewarganegaraan, bukan sekadar naiknya kepuasan. Anggota yang semula merasa sebagai penerima proses berubah menjadi subjek yang merasa memiliki dan bertanggung jawab atas jalannya demokrasi di lingkungannya. Inilah inti belajar berdemokrasi lewat pengalaman: yang berubah bukan sebatas pengetahuan, tetapi cara seseorang memaknai hubungannya dengan negara dan komunitas. Dalam kerangka (Verba *et al*., 1995), keterlibatan ternyata tidak hanya memakai sumber daya psikologis, tetapi juga memproduksinya, karena rasa memiliki yang tumbuh menjadi bekal motivasi untuk keterlibatan berikutnya. Di titik inilah dampak partisipasi menjadi paling awet, sebab ia mengubah disposisi, bukan sekadar menambah pengalaman teknis.

Penguatan ini terjadi di tengah hambatan yang nyata, terutama keterbatasan waktu dan benturan dengan pekerjaan, studi, dan keluarga, ditambah beban serta kelelahan bagi pengisi peran formal, tekanan menjaga netralitas di lingkungan yang terpolarisasi, dan apatisme sebagian warga. Ada pula catatan kritis yang konsisten: pelatihan teknis yang belum merata (N2), koordinasi yang belum optimal (N1, R3), instruksi yang berubah-ubah menjelang hari pelaksanaan (R11), serta keterbatasan tenaga dan fasilitas (R21). Menariknya, hambatan itu lebih sering dimaknai sebagai pembelajaran yang memantapkan komitmen ketimbang pelemah niat (R13). Dampak semacam ini paling tepat dibaca sebagai pembentukan *civic competence* yang, dalam

pendidikan kewarganegaraan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk berpartisipasi aktif (Kahne & Middaugh, 2008). Anggota menjadi lebih paham seluk-beluk penyelenggaraan, lebih kritis menilai calon, dan lebih lapang menerima perbedaan pilihan, tanda bahwa ketiga unsur kompetensi tumbuh bersamaan dan memperkuat dimensi kemampuan dalam *Civic Voluntarism Model*.

Proses tumbuhnya kompetensi itu paling baik dijelaskan lewat *civic learning* yang menjadi dasar pembelajaran berbasis (Torney-Purta *et al*., 2001). Menjadi penyelenggara adalah belajar melalui tindakan, tempat pemahaman dibangun dari keterlibatan nyata, bukan transmisi teori. Maka kepuasan yang dirasakan tidak melulu soal kelancaran teknis, melainkan nilai pembelajaran dan keyakinan akan manfaat sosial, sebagaimana tergambar dalam kebanggaan menjadi bagian dari sejarah demokrasi lokal. Berbeda dengan kajian yang menekankan pembentukan kesadaran lewat media digital, kajian ini menonjolkan jalur lain, yakni pembelajaran langsung di lapangan yang menghasilkan kompetensi yang lebih praktis dan reflektif. Pola ketika hambatan justru mengeraskan komitmen menandakan tumbuhnya keberlanjutan partisipasi (*sustained civic engagement*), kesediaan untuk terus terlibat yang menjadi penanda kematangan. Keterlibatan dan kompetensi pun berputar dalam satu siklus: keterlibatan memperkuat kapasitas, dan kapasitas yang menguat menjadi bekal keterlibatan selanjutnya.

Satu dampak yang bernilai secara demokratis adalah tumbuhnya kepercayaan publik berkat kehadiran pemuda sebagai penyelenggara. Ketika warga melihat anak muda dari lingkungannya sendiri bertugas, muncul keyakinan bahwa proses di TPS akan berjalan jujur (R11). Di sini modal sosial berubah menjadi legitimasi proses, sehingga keterlibatan pemuda berdampak ganda, yakni menguatkan kapasitas individu sekaligus memperbaiki hubungan warga dengan lembaga pemilu di tingkat lokal. Sebaliknya, catatan tentang pelatihan yang belum merata dan koordinasi yang belum mapan menandai jarak antara *civic learning* yang berlangsung secara *de facto* dan dukungan kelembagaan yang semestinya menopangnya. Kompetensi yang tumbuh lewat belajar sambil melakukan memang efektif, tetapi rapuh dan bergantung pada kemampuan perorangan. Justru di situ terbuka ruang perbaikan: bila pengalaman langsung terbukti menumbuhkan kompetensi, memfasilitasinya lewat pelatihan terstruktur dan koordinasi yang stabil akan memperluas dampaknya, dan inilah dasar empiris bagi rekomendasi praktis kajian ini.

Secara keseluruhan, keempat tema memperlihatkan keterpaduan praktik *civic participation* di Karang Taruna Cimahi Selatan: *civic engagement* menerangkan bentuk keterlibatan yang majemuk dan berposisi hibrid, *civic responsibility* yang ditopang modal sosial menerangkan dorongannya, dan *civic competence* lewat *civic learning* menerangkan dampaknya. Ketiganya menempatkan organisasi kepemudaan sebagai infrastruktur kewarganegaraan. Gagasan ini melampaui pandangan yang sekadar melihat Karang Taruna sebagai penyedia tenaga sukarela, sebab sebagai infrastruktur ia menjalankan tiga fungsi yang biasanya dibahas terpisah, yaitu menyalurkan kesadaran menjadi peran, menggerakkan keterlibatan lewat modal sosial, dan menumbuhkan kompetensi melalui pengalaman. Keterpaduan itulah sumbangan konseptual kajian ini, karena menjelaskan bukan hanya bahwa organisasi kepemudaan berperan dalam demokrasi lokal, tetapi juga bagaimana peran itu bekerja secara sistemik, sehingga penguatan partisipasi pemuda tak bisa dilepaskan dari penguatan organisasi yang menaunginya.

4. Kesimpulan dan Saran

Partisipasi politik anggota Karang Taruna Kecamatan Cimahi Selatan sebagai penyelenggara Pilkada 2024 ternyata berwajah banyak dan tidak bisa disederhanakan menjadi keterlibatan formal belaka. Bentuknya terbentang pada kontinum formal–informal yang ditandai munculnya posisi hibrid; dorongannya berasal dari perpaduan *civic responsibility* sebagai motif dari dalam dan modal sosial sebagai penggerak dari luar; sedangkan dampaknya berupa tumbuhnya *civic competence* dan kesediaan terus terlibat. Dalam kerangka itu, Karang Taruna berperan sebagai infrastruktur kewarganegaraan yang menyalurkan, menggerakkan, dan menumbuhkan partisipasi politik anggotanya.

Secara teoretis, kajian ini memperluas penerapan *Civic Voluntarism Model* (Verba et al., 1995) ke ranah organisasi kepemudaan berbasis kelurahan, sekaligus memberi koreksi bahwa dikotomi formal–informal dalam tipologi partisipasi yang lazim tidak selalu tegas di akar rumput. Kajian ini juga menegaskan bahwa keterlibatan pemuda sebagai penyelenggara lebih tepat diterangkan lewat tautan antara kesadaran kewarganegaraan dan jaringan sosial, sehingga menjadi bantahan bagi tesis apatisme generasi muda.

Secara praktis, temuan ini berimplikasi bagi sejumlah pihak. Penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan kepemiluan yang lebih merata dan inklusif serta membenahi koordinasi, agar kompetensi yang selama ini tumbuh otodidak dapat difasilitasi secara sistematis. Pengurus Karang Taruna dapat memakai temuan ini untuk memperkuat kaderisasi, meratakan kapasitas anggota, dan menjaga norma netralitas. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan, keterlibatan langsung sebagai penyelenggara terbukti menjadi ruang belajar yang efektif sehingga layak diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis pengalaman.

Kajian ini terbatas pada tiga dari lima kelurahan, belum sempat mengisi secara penuh sudut pandang informan ahli, dan temuannya bersifat kontekstual. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan, misalnya lewat pendekatan kuantitatif atau perbandingan antarwilayah untuk menguji keteralihan temuan, serta menelusuri lebih jauh keberlanjutan partisipasi pada masa pascapemilu yang dalam kajian ini baru tersentuh di permukaan.

5. Daftar Pustaka

Adler, R. P., & Goggin, J. (2005). What do we mean by "civic engagement." *Journal of Transformative Education*, *3(3)*, 236–253. https://doi.org/10.1177/1541344605276792

Alscher, P., Graf, E., & McElvany, N. (2026). Political participation and the Civic Voluntarism Model: How do resources, psychological engagement, and recruitment shape willingness to participate during adolescence? *Journal of Experimental Psychology: General*, *155(1)*, 73–93. https://doi.org/https://doi.org/10.1037/xge0001766

Boat, A. A., Poparad, H., Seward, M. D., Scales, P. C., & Syvertsen, A. K. (2024). The role of organized activities in supporting youth social capital development: A qualitative meta-synthesis. *Adolescent Research Review*, *9(3)*, 543–562. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40894-024-00235-1

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Cholisin. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. UNY Press.

Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.).* Sage Publications.

Dalton, R. J. (2008). *The good citizen: How a younger generation is reshaping American politics.* CQ Press.

Fox, S. (2024). Social action as a route to the ballot box: Can youth volunteering reduce inequalities in turnout? *European Journal of Political Research*, *63(1)*, 111–131. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.12586

Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, *4(1)*. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217

Huntington, S. & Nelson, J. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.* Harvard University Press.

Jennings, M. K., & Niemi, R. G. (1981). *Generations and politics: A panel study of young adults and their parents*. Princeton University Press.

Kahne, J., & Middaugh, E. (2008). *Democracy for some: The civic opportunity gap in high school*. Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement.

Karliani. (2014). Civic participation dalam demokrasi lokal: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *18(1)*. https://doi.org/10.1234/jisip.2014.18.1.70

Keeter, S. (2002). *What Americans know about politics and why it matters*. Pew Research Center.

Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Politik.* Penerbit LP3ES.

Nugraha, A., Garvera, R. R., & Sujai, L. (2024). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ciamis tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *3(5)*, 90–102. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1278

Pramana, D. (2025). Peran pemuda dalam politik lokal dan pemilihan kepala daerah 2024. *Jurnal Sociopolitico*, *7(1)*, 80–83. https://doi.org/https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i1.180

Prianti, D., Salsabila, A., Oktavis, R., Sujatnico, & Saputri, R. Y. (2024). Peran Karang Taruna Kemiling dalam meningkatkan partisipasi pemuda di bidang sosial dan politik. *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik*, *2(3)*, 83–90. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4534

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.* Simon & Schuster.

Simaremare, A., Malau, G. F. J., Sinaga, P. J., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Organisasi Karang Taruna dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Cinta Rakyat. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, *5(2)*. https://doi.org/https://doi.org/10.32585/cessj.v5i2.4714

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

Togala, R., Hadmar, A. M., & Nur, U. (2025). Analisis tingkat partisipasi pemuda dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, *12(2)*. https://doi.org/https://doi.org/10.59050/jkk.v12i2.403

Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. IEA.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics.* Harvard University Press.

Yin, R. K. (2011). *Case study research: Design and methods (4th ed.)*. Sage Publications.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).